

PERAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK ATAS MANAJEMEN LABA

Dilla Fauziah¹, Hanifa Aulia², dan Herimyetti³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bakrie, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit), ukuran perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accruals*. Populasi pada penelitian ini adalah 56 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sebanyak 14 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Kata Kunci: Manajemen Laba, Mekanisme *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of corporate governance mechanisms (institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, and audit committees), firm size, and the reputation of public accounting firms on earnings management as proxied by discretionary accruals. The population in this study were 56 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. The sampling technique used was purposive sampling method, so as many as 14 samples were obtained. This study uses multiple linear regression analysis using the SPSS 24 program. The results show that managerial ownership has a significant positive effect on earnings management. Meanwhile, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, firm size and reputation of public accounting firm have no significant effect on earnings management.

Key words: *Earning Managements, Corporate Governance, Firm Size, and Reputation of a Public Accounting Firm*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu

entitas. Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi

pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan (PSAK No. 1, revisi 2015). Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang baik, menunjukkan kinerja perusahaan bagus, sehingga akan membuat publik tertarik dengan perusahaan tersebut. Namun, laporan keuangan sering disalahgunakan oleh manajemen dengan melakukan manajemen laba.

Manajemen laba menurut Scott (2015) merupakan keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan. Meskipun manajemen laba tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, namun, adanya praktek ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan. Praktek ini juga dapat menurunkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan (Christiantie & Christiawan, 2013). Beberapa kasus terkait dengan laporan keuangan terjadi di perusahaan-perusahaan besar di beberapa negara, seperti Enron, Tyco, Global Crossing dan Worldcom. Kasus tersebut terjadi dikarenakan perusahaan tidak mampu menerapkan *good*

corporate governance.

Kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia adalah PT Timah (Persero) Tbk. Dalam kasus ini, sebanyak 30 karyawan menyampaikan tuntutan agar jajaran direksi perusahaan mengundurkan diri dikarenakan direksi PT Timah telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian dalam masa jabatannya selama tiga tahun sejak 2013. PT Timah diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I 2015, untuk menutupi kinerja perusahaan yang menurun (Tambang.co.id, 2016).

Kasus lainnya terjadi pada PT Bumi Resources Tbk yang terungkap di tahun 2010-2011 karena lalai dalam pembayaran pajak sebesar 376 miliar rupiah. Nilai pajak yang tidak dibayar perusahaan milik Grup Bakrie kurang lebih nilainya Rp 2,1 triliun. KPC di duga kurang bayar Rp 1,5 triliun, Bumi sebesar Rp 376 miliar, dan Arutmin sekitar Rp 300 Miliar (bisnis.tempo.co, 2010). Kasus tersebut berkaitan dengan pengakuan Gayus H. Tambunan, yang mengaku menerima Rp65 miliar saat pengurusan pajak perusahaan Grup Bakrie. Laporan keuangan BUMI mencatat jumlah beban keuangan yang harus dibayar lebih tinggi dari jumlah laba usahanya sendiri.

Berdasarkan penjelasan kasus-kasus diatas bahwa apapun yang dilakukan manajer dengan menaikkan atau menurunkan laba akan merubah informasi dalam laporan keuangan, hal tersebut juga dapat menimbulkan keraguan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Salah satu faktor yang memengaruhi manajemen laba adalah mekanisme GCG (Christiantie dan Christiawan, 2013).

Kepemilikan institusional adalah salah satu proksi dari mekanisme GCG untuk menangani kasus manajemen laba. Menurut Tarjo (2008) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Jika persentase saham perusahaan lebih besar dimiliki oleh investor institusional maka hal tersebut akan menekan tingkat kecenderungan manajer untuk melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik oleh investor yang berpengalaman. Kusumawardhani (2012) dan Widyaningsih (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan

Tiswiyanti, dkk (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Proksi lain dari mekanisme GCG adalah kepemilikan manajerial. Menurut Anggraeni dan Hadiprajitno (2013) penyatuan kepentingan antara manajer dan pemilik dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan memiliki kepentingan yang cenderung sama dengan pemegang saham lainnya. Dengan adanya penyatuan kepentingan tersebut, konflik keagenan akan berkurang sehingga manajer tidak terdorong untuk melakukan manajemen laba, melainkan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Menurut Karuniasih (2013) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Pemisahan kepentingan antara manajer dengan pemilik yang dapat menyebabkan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba tidak lagi terjadi dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen.

Faktor selanjutnya adalah proporsi dewan komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota

komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Dalam penelitian Zahrawani (2014) menyatakan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Namun, penelitian Raja (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi tindakan manajemen laba.

Faktor selanjutnya adalah komite audit. Menurut Pasal 121 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), komite audit merupakan salah satu jenis komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Penelitian yang dilakukan Tiswiyanti, dkk (2012) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit dapat mempengaruhi manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karena manajemen merasa kinerjanya diawasi oleh komite audit. Semakin besar jumlah komite audit

maka semakin memperkecil terjadinya tindakan manajemen laba. Namun, penelitian Putra dan Kusumaningtias (2018) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada manajemen laba disebabkan hanya sekedar keperluan atas terpenuhinya dalam suatu aturan tetapi bukan bermaksud memberi penegakan *corporate governance* perusahaan.

Faktor lain di luar GCG yang memengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Menurut Halim dan Sarwoko (2016) ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan, baik dari segi jumlah aktiva maupun dari segi tingkat penjualan, akan sangat mempengaruhi besarnya modal kerja. Penelitian Kusumawardhani (2012) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Zahrawani (2014) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Faktor selanjutnya adalah reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 menjelaskan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan. Investor akan lebih cenderung percaya pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. Anggraeni dan Hadiprajitno (2013) dan Prajitno dan Christiawan (2013) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap manajemen laba, KAP yang memiliki ukuran besar dan termasuk *the big four*, akan lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan jasa audit, sebab manajemen laba yang terlalu tinggi akan menyebabkan kurangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Adanya *research gap* dari peneliti terdahulu dan berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya praktik manajemen laba serta menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komite audit.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan atau dapat disebut dengan *agency theory* adalah dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menjelaskan konflik yang terjadi dalam

organisasi pada saat hubungan satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Adanya pemisahan fungsi antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen, sehingga menimbulkan biaya keagenan. Dengan adanya masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang akan timbul maka diperlukan suatu konsep *corporate governance* yang memperhatikan dan mengatur kepentingan para pihak yang terkait dengan pemilik dan operasional perusahaan.

Teori Sinyal

Hubungan antara *principal* dan *agent* berkaitan dengan hubungan komunikasi informasi yang baik demi kelancaran perusahaan, sehingga diperlukan teori sinyal yang sejalan. Teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberikan isyarat atau petunjuk kepada investor (Bringham & Houston,

2011). Menurut Gumanti (2009), sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun secara tidak langsung.

Mekanisme *Corporate Governance*

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Menurut Cadbury Committee (1992), GCG adalah prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* dan *stakeholders*. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. GCG dalam penelitian ini diukur ke dalam beberapa proksi, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajemen, komite audit,

reputasi KAP dan ukuran perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Menurut Tarjo (2008) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Pemilik institusional memiliki peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Semakin besar persentase kepemilikan saham institusional maka akan menekan tingkat kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba, karena investor institusional dapat mengumpulkan informasi, mengawasi tindakan manajemen, dan mendorong kinerja perusahaan yang lebih baik. Jika kepemilikan institusional relatif rendah, maka pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajemen akan rendah. Oleh karena itu, keberadaan investor institusional ini dipandang mampu menjadi alat *monitoring* efektif bagi perusahaan.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh manajemen yang secara aktif ikut mengambil keputusan perusahaan. Menurut Tjeleni (2013) kepemilikan manajerial adalah

situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial tinggi, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan menurun. Dengan semakin tingginya kepemilikan manajerial permasalahan keagenan yang diasumsikan akan semakin berkurang. Hal tersebut mendukung pernyataan Jensen (1986), bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga kinerja perusahaan semakin bagus.

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance*, 2006). Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai

penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep.315/BEJ/06-2000 yang menyatakan bahwa komposisi komisaris independen yang efektif dalam suatu perusahaan adalah paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris.

Komite Audit

Komite audit menurut KNKG (2006) adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (agen) dan memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak manajemen tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (prinsipal). Anggota komite audit harus bersifat independen untuk memastikan

laporan keuangan yang lebih berkualitas dan dapat dipercaya (Raja, 2014).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. Menurut Kusumawardhani (2012) ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, penjualan dan nilai pasar saham. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aktiva (*asset*) dan total penjualan (*net sales*) yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan yang berukuran lebih besar maka cenderung memiliki informasi lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut semakin banyak.

Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai

wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (PMK, 2008). Auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang independen diharapkan dapat menjadi mediator hubungan antara prinsipal dan agen. Investor akan lebih cenderung percaya pada data akuntansi yang dihasilkan dari kualitas audit yang tinggi. Auditor di KAP *big four* diyakini lebih berkualitas karena dibekali serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non-big four* (Isnanta, 2008 dalam Christiantie & Christiawan, 2013). Menurut Zahrawani (2014), KAP yang memiliki banyak klien pada industri tertentu akan memiliki pemahaman yang lebih dalam menentukan risiko audit. Semakin ahli KAP terhadap industri tertentu maka semakin baik audit yang dilakukan, sehingga manajemen laba lebih cepat terdeteksi.

Manajemen Laba

Menurut Copeland (1968:10), manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan, atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat

mengurangi keaslian laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat menyesatkan pemakai laporan keuangan tersebut.

Cara untuk meminimumkan terjadinya tindakan manajemen laba adalah dengan menerapkan mekanisme GCG dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan.

Menurut Scott (2015) terdapat pola-pola manajemen laba yang mungkin dilakukan manajemen perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. *Taking a bath*: mengakui biaya dan kerugian periode yang akan datang, pada periode berjalan ketika periode berjalan dalam keadaan buruk dan tidak menguntungkan.
2. *Income minimization*: menurunkan laba dengan mengakui biaya (seperti biaya pemasaran, riset dan pengembangan) secara lebih cepat ketika profit perusahaan cukup besar.
3. *Income maximization*: meningkatkan laba yang dilaporkan ketika profit perusahaan menurun,
4. *Income smoothing*: menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan,

sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko.

HIPOTESIS

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi di luar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan. Perusahaan yang persentase sahamnya lebih besar dimiliki oleh investor institusional maka akan menekan tingkat kecenderungan manajer untuk melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik oleh investor yang berpengalaman. Institusi yang memiliki saham pada perusahaan dapat melakukan monitoring dan dianggap tidak mudah dibodohi oleh manajemen karena institusi tersebut memiliki orang-orang yang ahli juga dalam laporan keuangan (Christiawan & Christiantie, 2013)

Penelitian Kusumawardhani (2012) menyatakan bahwa *corporate governance*, struktur kepemilikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Hasil penelitian Christiawan dan Christiantie (2013), dan Widyaningsih (2017) yang

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif pada variabel kepemilikan institusional secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh manajemen yang secara aktif ikut mengambil keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling, 1976), hal itu dikarenakan manajer akan ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial tinggi, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan menurun.

Dalam penelitian Karuniasih

(2013), Aurora (2018), Putri, dkk (2013), dan Kusumawardhani (2012) menyatakan bahwa ada pengaruh kepemilikan manajerial yang signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil peneliti terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2004).

Dalam penelitian Zahrawani (2014), Prajitno dan Christiawan (2013), Raja (2014), Kusumawardhani (2012), Widyaningsih (2017), dan Karuniasih (2013) menyatakan bahwa adanya pengaruh dewan komisaris yang signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu

maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Munculnya komite audit disebabkan adanya kecenderungan meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian pihak manajemen yang mengindikasikan kurangnya pengawasan terhadap manajemen. Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (agen) dan memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi. Tiswiyanti, dkk (2012) menyatakan bahwa semakin besar jumlah komite audit maka semakin memperkecil terjadinya tindakan manajemen laba. Hal tersebut menguatkan penelitian dari Kusumawardhani (2012), Anggraeni dan Hadiprajitno (2013), Widyaningsih (2017), Karuniasih (2013), Putri dan Sofyan (2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Jika perusahaan berukuran lebih besar maka cenderung memiliki informasi lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Dalam Penelitian Kusumawardhani (2012) menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada ukuran perusahaan dengan manajemen laba. Sedangkan dalam penelitian Anggraeni dan Hadiprajitno (2013) dan Zahrawani (2014) ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₅: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Reputasi KAP terhadap Manajemen Laba

Anggraeni dan Hadiprajitno (2013) menjelaskan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap manajemen laba, kondisi ini terjadi karena KAP yang

memiliki ukuran besar dan masuk kategori *the big four*, akan lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan jasa audit, sebab manajemen laba yang terlalu tinggi akan menyebabkan kurangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan. Prajitno dan Christiawan (2013) dan Zahrawani (2014) menyatakan bahwa Spesialisasi Industri KAP berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Ini mengindikasikan bahwa semakin ahli KAP terhadap industri tertentu maka semakin baik audit yang dilakukan sehingga manajemen laba dapat lebih cepat terdeteksi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₆: Reputasi KAP berpengaruh terhadap manajemen laba

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2018. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah

ditentukan. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2018. Pemilihan industri pertambangan dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik antara perusahaan pada industri pertambangan dan perusahaan industri lainnya.
2. Perusahaan pertambangan yang tidak delisting dari BEI selama periode 2015-2018.
3. Laporan keuangan perusahaan menggunakan mata uang Rupiah.
4. Perusahaan pertambangan yang memiliki data laporan keuangan secara lengkap periode 2015-2018.

Berdasarkan kriteria tersebut, selama periode penelitian tahun 2015-2018 terdapat sebanyak 42 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dikurangi dengan sebanyak 2 perusahaan yang mengalami delisting, 25 perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. 1 perusahaan yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan. Maka, diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan dalam satu periode, sehingga jumlah sampel

selama empat tahun periode penelitian adalah 56 sampel.

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder yang dipublikasikan oleh BEI dan situs resmi perusahaan.

Definisi Operasional

Manajemen Laba

Pengukuran manajemen laba menggunakan *discretionary accrual* (DAC). Dechow, dkk. (1995), mempertimbangkan versi modifikasi Model Jones dalam analisis empiris. Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan kredit. Untuk mengukur DAC, terlebih dahulu akan mengukur total akrual. Total akrual diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary* dan *nondiscretionary* (Dechow dkk., 1995), dengan tahapan:

1. Mengukur **Total Accrual (TAC)** = laba bersih setelah – arus kas operasi

2. Untuk mengetahui nilai a_1 , a_2 , a_3 dengan menghitung nilai *accruals* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*):

$$TAC_t / A_{t-1} = \alpha_1 (1/A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1}) + e$$

Dimana:

TAC_t : Total *accruals* perusahaan i pada periode t

A_{t-1} : Total *asset* untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REV_t : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t : Aktiva tetap (*gross property plant and equipment*) perusahaan tahun t

e : Error

3. Menghitung *nondiscretionary accruals model* (NDA):

$$NDA_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t / A_{t-1} - \Delta REC_t / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1})$$

Dimana:

NDA_t : *NDA* pada tahun t

A_{t-1} : Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REV_t : Perubahan pendapatan perusahaan dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t : Aktiva tetap (*gross property plant and equipment*) perusahaan tahun t

RE_t : Perubahan piutang perusahaan dari tahun t-1 ke tahun t
 α : *Fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan *total accruals*

Non-Discretionary Accrual (NDAC) merupakan nilai prediksi atau *fitted value* dari model TAC_t / A_{t-1}, dan *Discretionary Accrual* (DAC) merupakan selisih dari *Total Accrual* (TAC) dengan *Non-Discretionary Accrual* (NDAC).

4. Menghitung *discretionary accruals* adalah sebagai berikut:

$$DACT = (TACT / At-1) - NDA_t$$

Dimana:

DACT : *Discretionary accruals* perusahaan pada periode t

TACT : *Total accruals* perusahaan pada periode t

A_{t-1} : Total aset untuk sampel perusahaan pada akhir tahun t-1

NDA_t : *Nondiscretionary accruals* pada tahun t

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang

beredar (Zahrawani, 2014). Skala pengukuran yang digunakan pada variabel ini adalah skala rasio:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Milik Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Zahrawani, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

$$KMNJ = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (dewan komisaris independen) dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Zahrawani, 2014). Menurut peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), sedikitnya sepertiga dari anggota komisaris pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI merupakan komisaris independen. Skala yang digunakan dalam variabel ini adalah skala rasio.

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris Perusahaan}}$$

Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Komite audit ini juga berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal. Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan rumus:

$$KA = \frac{\text{Jumlah komite audit independen}}{\text{Jumlah komite audit}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (SIZE) adalah besar kecilnya perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan nilai log total penjualan perusahaan pada akhir tahun. Penggunaan nilai logaritma natural dimaksudkan untuk menghindari problem data natural yang tidak berdistribusi normal (Zahrawani, 2014).

$$\text{Size} = \ln \text{ Total Aset}$$

Reputasi KAP

Semakin ahli KAP terhadap industri tertentu maka semakin baik audit yang dilakukan sehingga manajemen laba dapat lebih cepat terdeteksi. Hal ini disebabkan KAP yang memiliki banyak klien dalam industri

yang sama, akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus yang mewakili industri tersebut. Pengukuran variabel ini menggunakan skala nominal, angka 1 digunakan untuk mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan angka 0 mewakili perusahaan yang diaudit oleh KAP *non-big four* (Zahrawani, 2014).

Metode Analisis Data

Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Tahapan metode analisis adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model persamaan regresi yang dibentuk untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon_{1.i}$$

Keterangan:

Y_t : Manajemen laba

α_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$: Koefisien regresi masing-masing variabel

X_1 : Kepemilikan institusional

X_2 : Kepemilikan manajerial

X_3 : Komisaris independen

X_4 : Komite audit

X_5 : Ukuran perusahaan

X_6 : Reputasi KAP
 e_1 : *residual of error*
 i : perusahaan ke i

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas variabel-variabel penelitian (Ghozali, 2005). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	56	,09	3,25	,6595	,43915
Kepemilikan Manajerial	56	,00	,60	,1059	,18454
Dewan Komisaris Independen	56	,25	,75	,3964	,09354
Komite Audit	56	,33	1,00	,8996	,19239
Ukuran Perusahaan	56	25,57	31,14	28,1798	1,62014
Reputasi KAP	56	,00	1,00	,3571	,48349
Manajemen Laba	56	,00	,62	,0943	,10274
Valid N (listwise)	56				

Berdasarkan Tabel, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,09, nilai maksimum sebesar 3,25, hal ini menunjukkan bahwa nilai kepemilikan institusional dalam perusahaan sampel cukup tinggi. Nilai *mean* sebesar 0,6596 lebih besar dari standar deviasi 0,43915. Nilai *mean* sebesar 65% menunjukkan bahwa rata-rata sebagian besar kepemilikan perusahaan sampel dimiliki oleh pihak institusi.

Kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,00 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,60. Nilai *mean* sebesar 0,1059 lebih kecil dari standar deviasi sebesar 0,18454. Hal ini berarti pihak manajemen memiliki

proporsi kepemilikan saham yang sedikit.

Komisaris independen memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 0,25 dan 0,75. Nilai *mean* sebesar 0,3964 dan standar deviasi 0,09354. Nilai *mean* sebesar 39% menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh komisaris.

Nilai minimum dan maksimum yang diperoleh komite audit sebesar 0,33 dan 1,00. Nilai rata-rata sebesar 0,8996 dan standar deviasi 0,19239. Perusahaan sampel telah memenuhi persyaratan OJK yang mewajibkan jumlah komite audit paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang.

Nilai minimum dan maksimum yang diperoleh ukuran perusahaan sebesar 25,57 dan 31,14. Nilai rata-rata sebesar 28,1798 dan standar deviasi 1,62014. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran perusahaan perusahaan sampel relatif stabil.

Jumlah sampel untuk reputasi KAP adalah 56, hasil uji menunjukkan 20 perusahaan atau 36% menggunakan jasa KAP *big four* dan sisanya sebanyak 36 perusahaan atau 64% menggunakan jasa KAP *non big four*.

Nilai minimum manajemen laba sebesar 0,00, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,62. Nilai *mean* sebesar 0,0943

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama

dan standar deviasi sebesar 0,10274. Nilai rata-rata manajemen laba menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba di masa mendatang cukup besar.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Model regresi dikatakan mematuhi asumsi normalitas apabila nilai *Kolmogorov Smirnov* tidak signifikan atau lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi sebesar $0,078 > 0,05$, maka semua variabel berdistribusi normal.

dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang dipakai adanya multikolinearitas adanya nilai $tolerance \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$ (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
1 (Constant)			
KepemilikanInstitusional	,747	1,339	Tidak terjadi multikolinearitas
KepemilikanManajerial	,674	1,485	Tidak terjadi multikolinearitas
Dewan Komisaris Independen	,854	1,171	Tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audi	,934	1,070	Tidak terjadi multikolinearitas
Ukuran Perusahaan	,454	2,204	Tidak terjadi multikolinearitas

ReputasiKAP	,489	2,046	Tidak terjadi multikolinearitas
-------------	------	-------	---------------------------------

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji berikut ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah

dengan melakukan uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *Glejser* jika $Sig.>0,05$ tidak terjadi Heteroskedastisitas dan jika $Sig.<0,05$ maka terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Understandardized residual		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,340	,306		1,111	,272
KepemilikanInstitusional	,009	,030	,047	,292	,772
KepemilikanManajerial	-,042	,074	-,096	-,565	,575
Dewan Komisaris Independen	-,067	,130	-,079	-,521	,605
Komite Audi	,055	,060	,131	,907	,369
Ukuran Perusahaan	-,010	,010	-,206	-,993	,325
ReputasiKAP	,011	,033	,067	,335	,739

Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW), dengan hasil bila nilai DW antara du dan (4-du) berarti tidak terjadi autokorelasi (Ghozali, 2016).

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi, diperoleh nilai DW sebesar 1,909 berada diantara nilai dU sebesar 1,8124 dan 4-dU sebesar 2,1876, sehingga model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

	Model	Coefficients	Std. Error	t	Sig.
1	(Constant)	,568	,372	1,527	,133
	KI	,035	,037	,957	,344
	KM	,279	,124	2,241	,030
	DK	,195	,202	,967	,339
	KA	-,207	,098	-2,112	,040
	UP	,031	,020	1,560	,126
	RKAP	,041	,063	,660	,513

Berdasarkan uji regresi linear berganda, persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$ML = 0,568 + 0,035KI + 0,279KM + 0,195DK - 0,207KA + 0,031UP + 0,041RKAP + e$$

Konstanta sebesar 0,568 menyatakan bahwa apabila variabel independen (Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Reputasi Kantor Akuntan Publik) bernilai 0, maka besarnya nilai Manajemen Laba adalah sebesar 0,568.

Koefisien regresi untuk Kepemilikan Instotusional sebesar 0,035 dan bertanda positif, artinya jika variabel independen lain nilainya 0 dan kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka manajemen laba (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,035. Koefisien bertanda positif artinya terjadi pengaruh

positif antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba, semakin meningkat kepemilikan institusional maka semakin besar manajemen laba.

Koefisien regresi untuk Kepemilikan Manajerial sebesar 0,279 dan bertanda positif, artinya jika variabel independen lain nilainya 0 dan kepemilikan manajerial mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka manajemen laba akan mengalami kenaikan sebesar 0,279. Koefisien bertanda positif artinya terjadi pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba, semakin meningkat kepemilikan manajerial maka semakin besar manajemen laba.

Koefisien regresi untuk Dewan Komisaris Independen sebesar 0,195 dan bertanda positif. Koefisien bertanda positif artinya terjadi pengaruh positif antara dewan komisaris indpenden

dengan manajemen laba, semakin banyak dewan komisaris independen maka semakin besar manajemen laba.

Koefisien regresi untuk Komite Audit sebesar -0,207 dan bertanda negatif. Koefisien bertanda negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara komite audit dengan manajemen laba, semakin sedikit komite audit maka semakin turun manajemen laba.

Koefisien regresi untuk Ukuran Perusahaan sebesar 0,031 dan bertanda positif, artinya jika variabel independen lain nilainya 0 dan ukuran perusahaan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka manajemen laba akan mengalami kenaikan sebesar 0,031. Koefisien bertanda positif artinya terjadi pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba, semakin meningkat

ukuran perusahaan maka semakin besar manajemen laba.

Koefisien regresi untuk Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebesar 0,041 dan bertanda positif, artinya jika variabel independen lain nilainya 0 dan reputasi KAP mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka manajemen laba (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,041. Koefisien bertanda positif artinya terjadi pengaruh positif antara reputasi KAP dengan manajemen laba, semakin meningkat reputasi KAP maka semakin besar manajemen laba.

Hasil Uji t (Parsial)

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada Tabel di bawah, dari seluruh variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t

Model	Coefficients	t	Sig.	Hasil
1 (Constant)	,568	1,527	,133	
KI	,035	,957	,344	Tidak berpengaruh
KM	,279	2,241	,030	Berpengaruh
DK	,195	,967	,339	Tidak berpengaruh
KA	-,207	-2,112	,040	Berpengaruh
UP	,031	1,560	,126	Tidak berpengaruh
RKAP	,041	,660	,513	Tidak berpengaruh

Berdasarkan tabel di atas, dilakukan pembahasan hipotesis, yakni variabel kepemilikan institusional memperoleh nilai signifikan sebesar $0,344 > 0,05$, maka dapat disimpulkan **H1 ditolak**. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikan sebesar $0,030 > 0,05$, maka **H2 terdukung**. Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai signifikan sebesar $0,339 > 0,05$, maka **H3 ditolak**. Variabel komite audit memiliki nilai signifikan sebesar $0,040 < 0,05$, maka **H4 terdukung**. Variabel ukuran perusahaan nilai signifikansi sebesar $0,126 > 0,05$, maka **H5 ditolak**. Variabel reputasi KAP memiliki nilai signifikan sebesar $0,513 > 0,05$, maka **H6 ditolak**.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengetahui kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pula pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai *adjusted R²* sebesar 0,097, artinya masing-masing variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 9,7%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional di penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti, banyaknya kepemilikan institusional tidak dapat mengontrol pengambilan keputusan dan meningkatkan GCG perusahaan. Hal ini terjadi karena hanya 7 dari 24 bank yang diteliti yang kepemilikan institusionalnya di atas 80%, sementara sisanya sebesar 17 bank berkisar antara 20%-70% kepemilikan institusionalnya. Selain itu, meski perusahaan memiliki institusional yang tinggi, biasanya pemilik menyerahkan ke komisaris untuk pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Maka, kenaikan atau penurunan kepemilikan institusional tidak berdampak pada kenaikan atau penurunan *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan di BEI. Sejalan dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) dan Astrian dkk. (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian Pranata dkk (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen dalam

penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan data yang dikumpulkan sebanyak 24 bank sudah memiliki komisaris independen paling tidak setengah dari total komisaris, namun komisaris independen yang dimiliki belum tentu kompeten dalam bidang keuangan. Maka kesimpulannya adalah kenaikan atau penurunan nilai komisaris independen tidak berdampak pada kenaikan atau penurunan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Annisa dan Kurniasih (2012) yang menunjukkan tidak ada pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Maharani dan Suardana (2014) dan Prakosa (2013) menyebutkan ada pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*.

Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial pada penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil dari uji t, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hal tersebut dengan kenaikan atau penurunan nilai kepemilikan manajerial tidak berdampak pada kenaikan atau penurunan *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan di BEI. Hasil penelitian

ini sejalan dengan Mahulae, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Pohan (2009) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit dalam penelitian ini terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti adanya komite audit di dalam perusahaan dapat melaksanakan pengawasan independen terhadap laporan keuangan dan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung dengan bukti bahwa 24 bank yang diteliti memiliki komite audit yang jumlahnya 3 sampai 7 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan nilai komite audit akan berdampak pada kenaikan atau penurunan *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan di BEI. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tommi dan Maria (2013) yang menyatakan bahwa komite audit mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan Prakosa (2014) menyatakan bahwa komite audit tidak memengaruhi

penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Kualitas audit pada penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* hasil auditnya bagus. Namun arah positif dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa KAP yang memiliki reputasi baguspun juga dapat mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* dikarenakan tingkat intelektual yang tinggi dari KAP. Berdasarkan hasil penelitian dari 24 bank, ada 5 bank (BACA, BBMD, BBNP, BSIM dan NOBU) yang diaudit oleh KAP non *Big Four* (Crowe Howarth, KAP Leonard, Mulia dan Richard, BKR International, Moore Stephen, RSM AAJ). Sementara untuk BJTM, pada tahun 2015 dan 2016 diaudit oleh Kreston. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan nilai kualitas audit akan berdampak pada kenaikan atau penurunan *tax avoidance* perusahaan sektor perbankan di BEI.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Annisa dan Kurniasih (2012) dan juga Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini tidak sejalan

dengan Fadhilah (2014) yang menyatakan adanya pengaruh negatif dari kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan dan hasil uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dan kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sementara kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai perusahaan.

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian, menggunakan tahun periode, dan menambahkan indikator faktor internal keuangan lainnya sehingga dapat mengetahui faktor-faktor utama yang memengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, N. A., & Kurniasih L. (2012).
Pengaruh *Corporate Governance*

- terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8, 2, 95-189.
- Astrian., Puspa, D. F., & Ethika. (2013). Pengaruh *Corporate Governance* dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2010-2013. *E-Journal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*. Jakarta.
- Bursa Efek Jakarta. (2000). *Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ). Kep-315/BEJ/06/2000*. Jakarta: BEJ.
- Dewi, N. K. & Jati, IK. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 6, 2.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariat dalam Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Maharani, I G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur*. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D. & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 3, 2.
- Menteri Keuangan. (2016). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. 118/PMK.03/2016. Jakarta.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- Pranata, F. M., Puspa, D. F., & Herawati. (2013). Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Corporate Governance* terhadap Tax Avoidance. *Abstract of Undergraduates Research: Faculty of Economics, Bung Hatta University*.
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio *Tobin Q*, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan

Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4, 113-115.

Tommi & Maria. (2013). Pengaruh *Return on Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 1.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2016). Pengampunan Pajak. Jakarta.

